

# Usulan terhadap hasutan kebencian dan diskriminasi: dokumen ringkasan

# Daftar Isi

|   |   |
|---|---|
| Enam usulan.....  | 3 |
| Apa yang dimaksud dengan ujaran yang menghasut?.....                                | 5 |
| Ujaran yang menghasut menyebabkan bahaya .....                                      | 5 |
| Undang-undang saat ini.....   | 5 |
| Kebebasan berekspresi dilindungi tetapi tunduk pada batasan yang wajar .....        | 6 |
| Masalah dengan hukum telah diidentifikasi.....                                      | 7 |
| Pertimbangan Perjanjian Waitangi .....  | 7 |
| Pertanyaan untuk umpan balik pada usulan .....                                      | 7 |
| Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda mengalami ujaran atau perilaku kebencian ..... | 8 |
| Informasi selengkapnya .....  | 9 |

Te Tāhū o Te Ture – Kementerian Kehakiman (Kementerian) meminta umpan balik Anda tentang enam usulan untuk mengubah undang-undang yang berkaitan dengan hasutan kebencian dan diskriminasi.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1993 melarang ujaran yang menghasut (memprovokasi) disharmoni rasial. Undang-Undang ini juga melarang diskriminasi terhadap seseorang karena ciri-ciri identitas mereka.

Setelah peninjauan oleh Kementerian dan rekomendasi dari Komisi Penyelidikan Kerajaan atas serangan teroris di masjid Christchurch pada 15 Maret 2019, Pemerintah mengusulkan perubahan untuk memperkuat dan memperjelas perlindungan ini.

Pemerintah juga mengusulkan dua perubahan undang-undang yang lebih luas mengenai ketentuan diskriminasi.

Aotearoa Selandia Baru adalah negara yang beragam. Pemerintah ingin memperkuat kohesi sosial dan membuat Aotearoa Selandia Baru aman bagi semua orang. Meningkatkan perlindungan terhadap ujaran yang menghasut kebencian, dan perlindungan terhadap diskriminasi akan mendukung hal ini.

Kebebasan berekspresi adalah suatu nilai penting di Aotearoa Selandia Baru. Hal ini merupakan bagian dari Undang-Undang Hak Asasi Selandia Baru tahun 1990, di samping kebebasan dari diskriminasi. Perubahan undang-undang yang diusulkan bertujuan untuk melindungi hak-hak ini dengan lebih baik, termasuk memastikan agar orang yang mengalami ujaran kebencian dapat dengan bebas mengekspresikan diri. Undang-Undang Hak Asasi memungkinkan pembatasan hak yang dapat dibenarkan, menyeimbangkan hak dan kepentingan antar sesama.

Pemerintah pada dasarnya telah menyetujui enam usulan. Ini artinya Pemerintah menganggap perubahan tersebut merupakan gagasan yang baik tetapi harus dikaji terlebih dahulu apakah perubahan tersebut memenuhi harapan masyarakat sebelum membuat keputusan akhir tentang apakah dan bagaimana cara mengubah undang-undang tersebut. Usulan ini dapat berubah tergantung pada umpan balik yang diterima.

Usulan-usulan tersebut tercantum di bawah ini. Singkatnya, usulan ini bertujuan untuk:

- meningkatkan kelompok orang yang dilindungi oleh ketentuan penghasutan
- memperjelas perilaku apa yang dilarang oleh hukum dan konsekuensi apa yang diterima jika melanggar hukum
- meningkatkan perlindungan bagi kelompok terhadap diskriminasi yang lebih luas.

Anda dapat menemukan latar belakang yang lebih rinci tentang undang-undang saat ini, usulan untuk perubahan dan alasannya dalam dokumen diskusi lengkap ini: *Usulan terhadap hasutan kebencian dan diskriminasi* tersedia di [www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination](http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination).

# Kami ingin mendengar tanggapan Anda

Pemerintah menginginkan umpan balik (pengajuan usulan) Anda untuk membantu memutuskan apakah akan membuat perubahan yang diusulkan, atau mengubah beberapa bagian darinya, atau mengambil tindakan yang berbeda.

Pengajuan usulan dibuka mulai 25 Juni hingga 6 Agustus 2021. Anda dapat mengirimkan laporan Anda melalui situs web Citizen Space <https://consultations.justice.govt.nz>, melalui email [humanrights@justice.govt.nz](mailto:humanrights@justice.govt.nz), atau melalui pos ke Hak Asasi Manusia, Kementerian Kehakiman, SX10088, Wellington.

Untuk informasi selengkapnya tentang proses pengajuan usulan, termasuk informasi tentang kerahasiaan dan informasi pribadi, silakan lihat dokumen diskusi di situs web kami: [www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination](http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination)

Silakan lihat halaman 6 dari Dokumen diskusi untuk informasi selengkapnya tentang kerahasiaan dan informasi pribadi. Anda harus membaca ini sebelum mengirimkan umpan

## Enam usulan

|   |  |
|---|--|
| <p><b><i>Usulan Pertama: Mengubah bahasa ketentuan penghasutan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1993 agar lebih melindungi kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.</i></b></p> | <p>Ketentuan penghasutan saat ini hanya berlaku untuk ujaran yang menargetkan suatu kelompok karena warna kulit, ras, atau asal etnis atau kebangsaan mereka. Kelompok lain juga menjadi sasaran ujaran kebencian, termasuk kelompok berdasarkan agama, jenis kelamin, seksualitas, dan disabilitas mereka. Usulan ini akan mengubah undang-undang yang juga berlaku jika kebencian dilakukan terhadap sekelompok orang karena karakteristik yang lebih luas. Usulan ini dapat mencakup beberapa, atau semua alasan diskriminasi terlarang lainnya pada pasal 21 dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (pasal ini diatur dalam Lampiran Satu dari Dokumen Diskusi). Kami meminta pandangan tentang kelompok mana yang harus dilindungi melalui perubahan ini. Informasi selengkapnya tersedia di Dokumen Diskusi pada halaman 17.</p> |
| <p><b><i>Usulan Kedua: Mengganti ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1993 dengan tindak pidana baru dalam Undang-Undang</i></b></p>                             | <p>Artinya, seseorang yang dengan sengaja menghasut, mendorong, mendukung, atau membiasakan kebencian terhadap suatu kelompok yang dilindungi akan melanggar hukum jika melakukannya dengan mengancam, melecehkan, atau menghina, termasuk dengan menghasut kekerasan. Usulan ini akan berlaku bagaimanapun caranya mereka membuat ancaman atau pelecehan,</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b><i>Pidana tahun 1961 yang lebih jelas dan efektif.</i></b></p>   | <p>termasuk secara lisan, tertulis, atau online. Untuk informasi selengkapnya tentang kelompok mana yang harus dilindungi, lihat Usulan Pertama. Informasi selengkapnya tersedia di Dokumen Diskusi pada halaman 18.</p>  |
| <p><b><i>Usulan Ketiga: Meningkatkan hukuman untuk tindak pidana agar lebih mencerminkan keseriusannya.</i></b></p>  | <p>Hukuman saat ini adalah penjara hingga tiga bulan atau denda hingga \$7.000. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan hukuman menjadi hingga tiga tahun penjara atau denda hingga \$50.000. Informasi selengkapnya tersedia di Dokumen Diskusi pada halaman 19.</p>   |
| <p><b><i>Usulan Keempat: Mengubah bahasa ketentuan penghasutan perdata agar sesuai dengan perubahan yang dilakukan pada ketentuan pidana.</i></b></p>  | <p>Usulan ini akan menambahkan ‘menghasut/mendorong, mendukung atau membiasakan kebencian’ di samping kata-kata yang ada dalam ketentuan perdata (pasal 61). Kami juga menyambut umpan balik tentang cara lain untuk menyempurnakan ketentuan ini. Informasi selengkapnya tersedia di Dokumen Diskusi pada halaman 21.</p>  |
| <p><b><i>Usulan Kelima: Mengubah ketentuan perdata sehingga menjadikan ‘hasutan untuk mendiskriminasi’ melanggar hukum.</i></b></p>  | <p>Undang-undang akan berubah sehingga seseorang dilarang menghasut atau mendorong orang lain untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang akan dilindungi oleh ketentuan hasutan kebencian (lihat Usulan Pertama). Hal ini memungkinkan pengaduan ke Komisi Hak Asasi Manusia tentang perilaku semacam ini. Informasi selengkapnya tersedia di Dokumen Diskusi pada halaman 22.</p>  |
| <p><b><i>Usulan Keenam: Menambahkan alasan diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk memperjelas bahwa orang transgender, beragam gender, dan interseks dilindungi dari diskriminasi.</i></b></p> | <p>Saat ini, melakukan diskriminasi terhadap orang karena jenis kelamin mereka merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah menganggap bahwa tindakan ini termasuk diskriminasi berdasarkan identitas atau ekspresi gender, karakteristik jenis kelamin atau status interseks. Usulan ini menyarankan untuk membuat undang-undang yang lebih jelas tentang hal tersebut. Informasi selengkapnya tersedia di Dokumen Diskusi pada halaman 23.</p> |

# Apa yang dimaksud dengan ujaran yang menghasut?

'Ujaran kebencian' adalah istilah luas yang tidak digunakan dalam hukum Aotearoa Selandia Baru. Secara umum diartikan sebagai ujaran yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik umum, misalnya suku, agama, atau seksualitas.

Keenam usulan di atas secara khusus berkaitan dengan ujaran yang menghasut kebencian terhadap suatu kelompok. Ujaran yang menghasut kebencian adalah ujaran yang melecehkan atau mengancam yang mendorong permusuhan terhadap suatu kelompok orang (bukan ditujukan kepada satu orang) berdasarkan kesamaan sifat. Inilah alasan mengapa kita berbicara tentang 'ujaran yang menghasut', 'hasutan kebencian' dan 'ketentuan penghasutan'.

Usulan-usulan ini tanpa memandang apa pun bentuk kejahatan kebencian tersebut. Informasi selengkapnya tentang pekerjaan terkait yang tidak tercakup dalam usulan ini dapat ditemukan di Dokumen Diskusi pada halaman 25.

## Ujaran yang menghasut menyebabkan bahaya

Ujaran yang menghasut kebencian menyebabkan bahaya yang besar. Hal tersebut berdampak buruk terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dan dapat menimbulkan kekerasan. Hasutan kebencian dapat merusak masyarakat kita karena menyebabkan rasa sakit dan menahan inklusi sosial. Tindakan ini dapat menyebarkan rasa tidak percaya dan perpecahan antar semua masyarakat kita di seluruh Aotearoa Selandia Baru.

Meningkatkan perlindungan terhadap hasutan kebencian akan mendorong masyarakat yang lebih aman dan memperkuat pandangan masyarakat kita bahwa jenis perilaku ini berbahaya.

Menghasut kebencian juga dilarang berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional, sehingga mengubah undang-undang akan membantu kita memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional.

## Undang-undang saat ini

Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1993 berisi ketentuan pidana dan ketentuan perdata. Sistem hukum perdata mencakup perselisihan pribadi antara individu, organisasi, dan dalam beberapa kasus, pemerintah daerah atau pusat. Sistem hukum pidana bertujuan untuk mengidentifikasi dan melarang perilaku yang lebih serius dan berbahaya dengan menghukum orang yang melanggar hukum.

Berdasarkan ketentuan perdata (pasal 61), termasuk melanggar hukum apabila menggunakan, memublikasikan, menyiarkan atau mendistribusikan materi tertulis atau menggunakan kata-kata yang keduanya:

1. mengancam, melecehkan atau menghina, dan

2. cenderung menghasut permusuhan atau menghina kelompok mana pun berdasarkan warna kulit, ras, atau asal etnis atau kebangsaan mereka.

Seseorang dapat mengadu kepada Komisi Hak Asasi Manusia ketika mereka merasa seseorang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum.

Ketentuan pidana (pasal 131) mengatakan bahwa termasuk pelanggaran pidana apabila menghasut disharmoni rasial dengan memublikasikan, menyiarkan, atau mendistribusikan materi tertulis, atau menggunakan kata-kata yang semuanya bersifat berikut:

1. mengancam, melecehkan, atau menghina
2. kemungkinan menimbulkan permusuhan atau niat menyakiti terhadap, atau menghina atau mengolok-olok kelompok mana pun atas dasar warna kulit, ras, atau asal-usul etnis atau kebangsaan, dan
3. dimaksudkan untuk memicu permusuhan, niat menyakiti, penghinaan atau ejekan.

Pelanggaran ini dapat dihukum hingga tiga bulan penjara, atau denda sebesar \$7.000.

## **Kebebasan berekspresi dilindungi tetapi tunduk pada batasan yang wajar**

Kebebasan berekspresi adalah landasan masyarakat kita, tetapi kebebasan tersebut bukan berarti seseorang memiliki hak untuk mengatakan apa pun yang mereka inginkan. Sama halnya semua hak dan kebebasan dalam Undang-Undang Hak Asasi, hak atas kebebasan berekspresi dapat dibatasi oleh hukum sedemikian rupa sehingga dapat dibenarkan dalam masyarakat yang bebas dan demokratis.

Ketentuan hasutan saat ini memberikan batasan yang dapat dibenarkan atas kebebasan berekspresi. Ketentuan ini membentuk pendekatan berimbang yang mempertimbangkan keseriusan ujaran kebencian terhadap beratnya hukuman. Ketentuan hasutan menargetkan ujaran yang akan membuat orang lain percaya bahwa suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok etnis yang berbeda tidak dapat berfungsi secara efektif. Jenis ujaran ini berusaha untuk membuat orang saling bermusuhan dan menyebabkan perpecahan antar masyarakat.

Undang-undang menjadikan hasutan atas sikap ini ilegal karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokratis Aotearoa Selandia Baru. Sikap ini didasarkan pada gagasan bahwa karena kesamaan karakteristik (seperti etnis, agama, atau seksualitas) beberapa kelompok orang memiliki nilai yang lebih rendah daripada yang lain. Mungkin terdapat keyakinan bahwa kelompok-kelompok ini tidak boleh memiliki hak yang sama, dan/atau diperlakukan berbeda dan dikucilkan dari masyarakat yang lebih luas.

Penting untuk diperhatikan bahwa usulan ini tidak menurunkan ambang batas untuk meng kriminalisasi ujaran atau mencegah debat publik tentang perkara-perkara penting.

Tujuan dari usulan perubahan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa hak setiap orang dilindungi, dan setiap orang dapat mengekspresikan diri tanpa rasa takut.

## Masalah dengan hukum telah diidentifikasi

Kementerian melakukan pengkajian undang-undang pada tahun 2019 dan mengidentifikasi beberapa masalah. Komisi Penyelidikan Kerajaan atas serangan teroris di masjid Christchurch pada 15 Maret 2019 juga mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan perubahan.

Tiga poin penting telah diidentifikasi:

1. Kata-kata ketentuan pidana dan ketentuan perdata tidak jelas. Komisi Kerajaan merekomendasikan penyusunan ulang kata-kata untuk ketentuan pidana.
2. Lebih banyak kelompok terpengaruh oleh ucapan yang menghasut kebencian daripada kelompok yang saat ini dilindungi. Ketentuan tersebut hanya mencakup ras, kebangsaan, suku, dan warna kulit. Ini hanya empat dari tiga belas 'alasan diskriminasi yang dilarang' dalam pasal 21 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
3. Hukuman untuk tindak pidana relatif rendah dibandingkan dengan keseriusan dengan sengaja dalam menghasut kebencian.

Kami meminta umpan balik Anda tentang enam usulan untuk mengatasi masalah ini dengan undang-undang saat ini.

## Pertimbangan Perjanjian Waitangi

Te Tiriti o Waitangi - Perjanjian Waitangi relevan dengan ketentuan penghasutan dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan usulan prinsipnya. Suku Māori mengalami ujaran kebencian dan saat ini tercakup dalam ketentuan penghasutan atas dasar 'asal etnis' atau 'ras'. Usulan ini berusaha untuk lebih melindungi kelompok, termasuk Suku Māori, dari ucapan yang menghasut kebencian. Perlindungan akan diperkuat jika Suku Māori dilindungi oleh salah satu alasan diskriminasi terlarang lainnya, misalnya, terkait dengan takatāpui (Suku Māori yang mengidentifikasi diri dengan beragam jenis kelamin dan seksualitas).

## Pertanyaan untuk umpan balik pada usulan

Dokumen Diskusi berisi pertanyaan umum tentang semua usulan serta pertanyaan khusus untuk setiap usulan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tercantum di bawah ini.

Tiga pertanyaan yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pengajuan Anda pada semua usulan adalah:

- Apakah Anda melihat risiko atau konsekuensi yang tidak diinginkan yang timbul dari usulan tersebut dan jika iya, apa saja risikonya?
- Apakah ada cara agar usulan ini dapat ditingkatkan?
- Apakah usulan ini menyajikan masalah Perjanjian Waitangi lebih lanjut dari yang disebutkan?

Pertanyaan tentang Usulan Pertama:



- Apakah Anda setuju bahwa memperluas ketentuan hasutan dengan cara ini akan lebih melindungi kelompok-kelompok ini?
  - Apa alasannya atau mengapa tidak setuju?
- Menurut Anda, kelompok mana yang harus dilindungi melalui perubahan ini?
- Menurut Anda, apakah ada kelompok yang mengalami ujaran kebencian yang tidak terlindungi oleh perubahan ini?

Pertanyaan tentang Usulan Kedua:

- Apakah Anda setuju bahwa mengubah kata-kata dari ketentuan pidana dengan cara ini akan membuatnya lebih jelas dan lebih mudah dipahami?
  - Apa alasannya atau mengapa tidak setuju?
- Menurut Anda, apakah usulan ini akan menangkap jenis perilaku yang seharusnya melanggar hukum berdasarkan pelanggaran baru?

Pertanyaan tentang Usulan Ketiga:

- Menurut Anda, apakah hukuman ini secara tepat mencerminkan keseriusan kejahatan?
  - Apa alasannya atau mengapa tidak setuju?
- Jika Anda tidak setuju, kejahatan apa yang harus digunakan sebagai perbandingan yang tepat?

Pertanyaan tentang Usulan Keempat:

- Apakah Anda mendukung perubahan bahasa ini pada pasal 61 (ketentuan sipil)?
  - Apa alasannya atau mengapa tidak setuju?
- Menurut Anda, apakah ada bagian lain dari kata-kata saat ini dari ketentuan perdata yang harus diubah?

Pertanyaan tentang Usulan Kelima:

- Apakah Anda mendukung pelarangan hasutan untuk melakukan diskriminasi dalam pasal 61?
  - Apa alasannya atau mengapa Anda tidak mendukung?

Pertanyaan tentang Usulan Keenam:

- Apakah Anda menganggap bahwa terminologi ini tepat?
- Menurut Anda, apakah usulan ini cukup melindungi kelompok-kelompok yang seharusnya dilindungi dari diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia?
- Apakah Anda menganggap bahwa usulan ini secara tepat melindungi identitas gender khusus secara budaya, termasuk takatāpui?

## **Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda mengalami ujaran atau perilaku kebencian**

Jika Anda merasa keselamatan Anda terancam, harap hubungi Polisi. Jika darurat, hubungi 111. Jika Anda sedang tidak dalam bahaya, hubungi 105.

Untuk informasi tentang bagaimana Komisi Hak Asasi Manusia dapat membantu, kunjungi: <https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/>

Untuk informasi tentang pelecehan rasial:

<https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/>).

Untuk hinaan yang terjadi secara online: <https://www.netsafe.org.nz/>

Jika Anda ingin berbicara dengan seseorang tentang perasaan Anda, silakan hubungi atau SMS 1737.

## **Informasi selengkapnya**

**Anda dapat membaca dokumen diskusi lengkap di:**

[www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination](http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination)

**Informasi selengkapnya juga tersedia di Te Tāhū o Te Ture – situs web Kementerian Kehakiman di:**

[www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination](http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination)

